



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAN PENDAPAT KOMISI II DPR RI  
DENGAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 12 September 2023  
Waktu Rapat : Pukul 14.35 s.d. 16.38 WIB  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III  
Gedung Nusantara I DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Saan Mustopa, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
- Acara Rapat : Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.  
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 24 dari 47 orang Anggota dengan rincian:
- A. ANGGOTA DPR RI:  
PIMPINAN:
1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung  
(Ketua/F-P. GOLKAR)
  2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)
  3. Saan Mustopa, M.Si.  
(Wakil Ketua/ F-NASDEM)
  4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua/F-PPP)
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:  
7 orang Anggota dari 12 Anggota:
1. Arif Wibowo
  2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
  3. Riyanta

4. Drs. Cornelis, M.H.
  5. Paryono
  6. Hj. Aida Muslimah
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:  
5 orang Anggota dari 7 Anggota:
    1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
    2. Ir. H. Arsyadjuliandri Rachman, MBA.
    3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putera, M.H., M.Kn.
    4. Drs. H. Riswan Tony DK
  3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:  
1 orang Anggota dari 6 Anggota:
    1. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
  4. FRAKSI NASDEM:  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Aminurokhman, S.E., M.M.
  5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. H. Haruna, M.A., M.B.A.
  6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
    1. H. Mohammad Muraz, M.M.
    2. Rezka Oktoberia
    3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
  7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:  
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Dr. H. Mardani Ali sera, M.Eng.
    2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
    3. Teddy Setiadi, S.I. Kom.
  8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
  9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:  
1 orang Anggota dari 1 Anggota:  
-
- ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:
1. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP)
  2. Ir. Hugua (F-PDIP)
  3. Drs. Difriadi (F-P. Gerindra)
  4. Khairul Muhtar, S.E., M.M. (F-PAN)

B. UNDANGAN:

1. Ketua KPU RI; dan
2. Ketua Bawaslu RI.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Kita mulai ya, biar lebih cepat.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,

**Saudara Ketua KPU beserta jajaran yang saya hormati,  
Saudara Ketua Bawaslu beserta jajaran yang saya hormati,  
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat,**

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional di bidang anggaran dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan dari sekretariat, rapat pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh mayoritas dari Anggota Komisi II DPR RI dari 47 Anggota Panja, 9 fraksi. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.35 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua KPU dan Ketua Bawaslu atas kehadirannya memenuhi undangan dalam rapat hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI, yang menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam rangka penyesuaian RKA-KL sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Oleh karena itu kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai rapat pada hari ini, yaitu penyesuaian RKA-KL RAPBN Tahun 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Yang kedua, pengambilan keputusan sekaligus penetapan RAPBN Tahun 2024, disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Bahwa rapat hari ini adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR RI yaitu melaksanakan fungsi anggaran. Oleh karena itu Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penyampaian penjelasan dalam rangka pengesahan anggaran Tahun 2024.

Pada kesimpulan rapat pendalaman yang lalu konsinyering, kita pernah lakukan konsinyering di Hotel Ayana disepakati bahwa Komisi II DPR RI telah menyetujui jumlah pagu anggaran dan usulan tambahan Tahun 2024 sebagai berikut.

Komisi II, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI pagu anggaran RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp28.365.496.586.000,00. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu RI pagu anggaran RAPBN Tahun 2024 sebesar Rp11.605.527.974.000,00 usulan tambahan anggaran Tahun 2024 ini dari Bawaslu RI sebesar Rp1.418.643.553.000,00.

Selanjutnya Komisi II DPR RI telah menerima surat dari Badan Anggaran DPR RI dengan nomor B/11091/AG.05.02/09/2023, tanggal 11 September 2023, perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024 yang intinya mengakomodir penambahan anggaran untuk kenaikan gaji sebagai berikut.

KPU kenaikannya sebesar Rp33.396.873.000,00. Untuk penambahan Bawaslu RI sebesar Rp6.092.142.000,00. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut maka pagu RAPBN 2024 KPU RI menjadi Rp28.398.893.459.000,00 dan Bawaslu RI menjadi sebesar Rp11.609.620.116.000,00.

Sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat yang lalu dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI maka Komisi II DPR RI meminta kepada mitra untuk menyampaikan tanggapan atau penjelasan.

Rapat hari ini juga akan melakukan penetapan terkait pagu anggaran Tahun 2024, Kementerian atau Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI menjadi pagu alokatif anggaran atau pagu devinitif tahun 2024.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut untuk mempersingkat waktu kami mempersilakan kepada Saudara Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk menyampaikannya.

*Nah, kita saya mau minta persetujuan dulu sebelum saya serahkan Ketua KPU dan Bawaslu. Kita, rapat akhiri sampai jam berapa? Setengah jam? 15.30 ya? Karenakan sudah kita dalam semua. Jadi, kita akan akhiri rapat sampai 15.30. Dan kalau memang masih dibutuhkan nanti kita akan tambah. Kalau misalnya bisa lebih cepat tidak perlu ada penambahan waktu, penambahan anggaran nanti kita diskusikan.*

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju-setuju.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Setuju ya?

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

**(RAPAT: SETUJU)**

Silakan Ketua KPU RI.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian,

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,  
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta,  
Para Anggota Bawaslu, dan Sekjen Bawaslu,  
Yang kami hormati Anggota KPU dan,  
Sekjen KPU beserta jajaran,**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024.

Yang pertama gambaran umum anggaran Pemilu Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada Tahun 2022. Sehingga alokasi anggaran juga sudah dimulai di Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 usulan anggaran Pemilu adalah Rp8.061.085.734.000,00. Alokasi Dipa jumlah Rp3.516.283.014.000,00 atau 43,62%. Berdasarkan usulan dan juga alokasi Dipa kekurangannya adalah Rp4.544.802.720.000,00 atau sama dengan 56,38%.

Untuk anggaran tahun 2023 usulan KPU untuk anggaran Pemilu adalah Rp23.857.317.226.000,00. Alokasi Dipa Rp20.256.596.163.000,00 atau sama dengan 83,91%. Kekurangannya adalah Rp3.600.721.063.000,00 atau 15,09%.

Untuk anggaran Tahun 2024 usulan KPU adalah Rp44.737.909.334.000,00. Alokasi DIPA adalah Rp27.391.137.871.000,00 atau sama dengan 61,23%. Kekurangannya adalah Rp17.346.771.463.000,00 atau sama dengan 38,77%.

Total anggaran tahun 2022, 2023, 2024 adalah Rp76.656.312.294.000,00. Untuk alokasi DIPA sampai saat ini totalnya adalah Rp51.164.017.048.000,00 sama dengan 66,74%. Kekurangannya adalah Rp25.492.295.246.000,00 atau 33,26%.

Anggaran Pemilu tahun 2024 yang diusulkan KPU sebanyak Rp76.656.312.244.000,00 dan hingga saat ini telah teralokasi sebanyak Rp51.164.017.048.000,00 atau sama dengan 66,74% dari pagu usulan.

Kebutuhan anggaran, usulan anggaran yang dibutuhkan KPU tahun 2024 adalah Rp44.737.909.334.000,00. Untuk pagu anggaran yang pertama, berdasarkan surat edaran bersama SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023, tanggal 31 Juli 2023 KPU mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp28.365.496.586.000,00.

Dalam pagu anggaran tersebut terdapat anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di 4 (empat) provinsi DOB yaitu sebanyak Rp974.358.715.000,00. Pagu indikatif KPU tahun 2024 untuk pemilu tahun 2024 sebanyak Rp27.391.137.871.000,00 setelah dikurangi pagu anggaran untuk Pilkada 4 (empat) provinsi daerah pemilihan baru. Pagu indikatif KPU tahun 2024 tidak termasuk anggaran Pemilu Presiden, Wakil Presiden putaran kedua.

Selanjutnya untuk anggaran KPU Tahun 2023. Realisasi anggaran per-program pagu anggaran tahun 2023 sebanyak Rp20.256.596.163.000,00. Realisasi anggaran sebesar 57,49% atau Rp11.645.112.714.037,00 per-7 September 2023.

Realisasi anggaran per-belanja 81,09% untuk belanja operasional pegawai. 55,66% untuk belanja operasional kantor. 55,77% untuk belanja non operasional. Jadi untuk dukungan manajemen, dukungan program manajemen pagunya Rp1.959.100.281.000,00 realisasinya Rp1.406.396.824.483,00 realisasi 71,79%.

Untuk yang kedua, program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Pagu anggarannya adalah Rp18.297.495.882.000,00. Realisasinya adalah Rp10.238.715.829.554,00 atau 55,96%.

- Kemudian untuk yang pertama, belanja operasional pegawai sebagaimana kami sampaikan tadi. Pagunya adalah Rp1.359.238.656.000,00. Realisasinya adalah Rp1.102.257.436.866,00 atau 81,09%.
- Yang kedua, belanja operasional kantor. Pagunya adalah Rp344.599.283.000,00 realisasinya Rp195.105.222.716,00 atau setara dengan 56,66%.
- Yang ketiga belanja non operasional pagunya Rp18.852.758.294.000,00 realisasinya Rp10.347.750.054.455,00 atau 55,77%.

Selanjutnya pagu anggaran KPU untuk tahun 2024.

Berdasarkan program:

- Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebanyak Rp26.287.030.228.000,00 atau 92,67%;
- Kemudian untuk program dukungan manajemen Rp2.078.466.358.000,00 atau 7,33%.

Berdasarkan tahapan:

- Untuk tahapan Pemilu sebanyak Rp25.295.183.372.000,00 atau setara dengan 89,17%;
- Untuk dukungan tahapan Pemilu Rp2.095.954.499.000,00 atau 7,39%;
- Kemudian untuk Pilkada 4 provinsi daerah otonomi baru sebanyak Rp974.358.715.000,00 atau setara dengan 3,44%.

Pagu anggaran KPU tahun 2024.

Pagu anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk Pemilu tahun 2024 sebanyak Rp28.365.496.586.000,00 akan digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Yang pertama, untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan, bimbingan teknis tahapan Pemilu sebesar Rp172.301.908.000,00;
- Yang kedua, untuk sarana dan prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi diklat teknis kepemiluan sebanyak Rp370.000.000.000,00;
- Yang ketiga, pengelolaan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik sebanyak Rp2.044.400.000.000,00;
- Yang keempat, pembentukan atau seleksi dan termasuk di dalamnya honor dan operasional badan *ad hoc* sebanyak Rp18.674.999.748.000,00;
- Kemudian yang kelima adalah untuk kegiatan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu sebanyak Rp2.602.189.554.000,00;
- Yang keenam, untuk advokasi hukum penyelesaian sengketa Pemilu dan penyusunan regulasi sebanyak Rp27.304.316.000,00;
- Yang ketujuh, untuk kegiatan kampanye dan sumpah janji sebanyak Rp886.647.988.000,00;
- Delapan, untuk belanja operasional dan operasional sebanyak Rp2.613.334.357.000,00;
- Sembilan, untuk pembiayaan Pilkada provinsi di empat daerah otonomi baru sebanyak Rp974.358.715.000,00.

Rencana kerja KPU untuk tahun 2024. Satu, sosialisasi penyuluhan bimbingan teknis sebanyak Rp172.301.908.000,00. Kegiatan dilakukan berupa:

- Sosialisasi tatap muka,
- Sosialisasi melalui media TV, cetak, radio, media massa dan *on line*.
- Sosialisasi melalui media lainnya;
- Rapat koordinasi terkait sosialisasi;
- Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan kelompok masyarakat.
- Yang keenam *monitoring*, supervisi dan pelaporan, itu di apa namanya dibagi kegiatan tersebut yang dilakukan oleh KPU pusat, KPU provinsi dan kabupaten/kota:

- Untuk KPU pusat sebesar Rp28.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk:

- KPU provinsi Rp26.797.858.000,00; kemudian
- Untuk KPU kabupaten/kota sebanyak Rp117.504.050.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang kedua adalah sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi dan diklat teknis kepemiluan sebesar Rp370.000.000.000,00. Kegiatan dilakukan diantaranya adalah:

- Penyediaan *visa, cloud* dan *s-dewan*;
- Yang kedua *security data center*;
- Yang ketiga *networking data center*;
- Yang keempat *server* dan *storage*;
- Yang kelima *data processing, modelling* dan *analitic*;
- Yang keenam internet dan sarana pendukung lain;
- Yang ketujuh diklat teknis kepemiluan.

Untuk di tingkat pusat sebanyak Rp42.933.017.000,00. Untuk diprovinsi Rp27.851.991.000,00. Untuk kabupaten/kota Rp299.214.992.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang ketiga adalah pengelolaan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik sebesar Rp2.044.400.000.000,00. Kegiatan dilakukan:

- Satu, rapat koordinasi logistik Pemilu;
- Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- Distribusi logistik Pemilu;
- *Monitoring* supervisi dan pelaporan;
- Koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk alokasi di KPU Pusat sebesar Rp509.704.637.000,00. Untuk di provinsi Rp634.632.695.000,00. Untuk di kabupaten/kota Rp900.062.668.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang keempat adalah pembentuk dan juga seleksi honor dan operasional badan ad hoc sebesar Rp18.674.959.748.000,00. Kegiatan yang dilakukan:

- Satu, pembentuk dan pengelolaan badan ad hoc;
- Dua, *monitoring* supervisi dan pelaporan;
- Tiga, koordinasi dengan instansi terkait;
- Yang keempat, honorarium dan operasional.

Untuk di pusat alokasinya sebesar Rp189.090.034.000,00 untuk provinsi adalah Rp9.987.226.000,00 untuk kabupaten/kota Rp18.475.882.488.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang kelima adalah kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat pusat dan penetapan hasil Pemilu tingkat nasional. Kegiatan yang dilakukan:

- Satu, bimtek pemungutan dan penghitungan suara Pemilu;
- Dua, pembentuk KPPS, di dalamnya termasuk pembentuk tenda KPPS, kursi, papan pengumuman dan lain-lain;
- Yang ketiga rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
- Yang keempat *monitoring*, supervisi dan pelaporan;
- Yang kelima koordinasi dengan instansi terkait.

Alokasi untuk di tingkat pusat sebesar Rp5.969.793.000,00. Untuk di provinsi Rp30.605.992.000,00. Kemudian kabupaten/kota Rp2.565.613.769.000,00.



Perlu kami laporkan dalam rapat kerja ini bahwa kalau di dalam pemilu-pemilu sebelumnya, Anggota KPPS yang tujuh orang itu yang dilatih hanya satu orang. Nah, untuk keperluan Pemilu 2024 nanti tujuh-tujuhnya Anggota KPPS akan kita latih semua, kita bimtek semua.

Selanjutnya rencana kerja KPU tahun 2024 untuk yang keenam adalah advokasi hukum, penyelesaian sengketa Pemilu dan penyusunan regulasi sebesar Rp27.304.316.000,00. Kegiatan dilakukan:

- Rapat koordinasi, penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Pengadaan jasa konsultan pengacara;
- Koordinasi dengan instansi terkait;
- Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan KPU, uji publik rancangan peraturan KPU, penyuluhan peraturan KPU, *monitoring* supervisi dan pelaporan.

Untuk di tingkat pusat alokasinya adalah Rp7.768.098.000,00. Untuk di provinsi adalah Rp6.738.700.000,00. Untuk alokasi di kabupaten/kota Rp12.797.518.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang ketujuh adalah kampanye dan sumpah janji dengan alokasi anggaran sebesar Rp886.647.988.000,00. Kegiatan dilakukan:

- Rapat koordinasi berkaitan dengan kampanye;
- Pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye;
- Debat publik untuk Pemilu Presiden;
- *Monitoring* supervisi dan pelaporan kampanye;
- Laporan dana kampanye;
- Pengucapan sumpah janji Anggota DPR dan DPD.

Untuk di tingkat pusat alokasi anggarannya Rp106.866.800.000,00. Untuk di provinsi Rp85.095.311.000,00. Kabupaten/kota alokasinya adalah Rp694.683.877.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang kedelapan adalah belanja operasional dan operasional sebesar Rp2.613.334.357.000,00. Kegiatan yang dilakukan:

- Belanja pegawai;
- Sewa kendaraan operasional;
- Operasional perkantoran;
- Rekrutmen Anggota KPU provinsi, kabupaten/kota;
- Penyusunan anggaran dan penyusunan program dan anggaran;
- Bimbingan teknis pengelolaan program dan anggaran;
- Koordinasi nasional penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
- Koordinasi dengan instansi terkait;
- *Monitoring* supervisi dan pelaporan.

Alokasinya adalah untuk KPU Pusat Rp224.838.845.000,00. Untuk provinsi Rp341.041.337.000,00. Alokasi untuk kabupaten/kota Rp2.047.454.175.000,00.

Rencana kerja KPU tahun 2024 yang kesembilan adalah Pilkada untuk 4 (empat) provinsi DOB dengan besar biaya adalah Rp974.358.715.000,00 beserta rinciannya sebagaimana tertulis di dalam paparan. Selanjutnya masih untuk pembiayaan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur di 4 (empat) provinsi DOB.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

**Pimpinan Komisi dan Ibu/Bapak Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Semoga bermanfaat dan mendapat persetujuan. Sebelum kami akhiri, sebelum dimulai rapat kerja kami dapat informasi sahabat kita Mas Toto Anggota Bawaslu sakit dan harus dirawat di rumah sakit, kita doakan bersama-sama semoga segera pulih dan sehat selalu.

Terima kasih, mohon maaf.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Saudara Ketua KPU RI.

Berikutnya kami persilakan kepada Ketua Bawaslu RI.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M):**

Terima kasih Pimpinan Komisi II.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Wakil Ketua Komisi II,  
Anggota Komisi II,  
Ketua KPU beserta Anggota beserta Sekjen beserta jajaran,  
Anggota Bawaslu ada Pak Heru Malunda, Pak Fuadi, dan juga tadi Pak Toto  
masih diobservasi,**

*Insyaallah* tidak ada apa-apa katanya hanya triginya naik.

**Kemudian Pak Sekjen yang ada di sini beserta para staff yang hadir,**

Kami akan bacakan pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2024. Anggaran tahun Bawaslu tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024.

Untuk realisasi anggaran pagu tahun anggaran 2023, Rp7.063.447.200

**F-...(...):**

**Ketua,**

Sebentar 2023 kan pernah kita bahas ya, itu di-skip saja.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Langsung, kalau memang perlu dibacain saja silakan.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M):**

Siapa tahu perlu realisasi.

Kemudian realisasi anggarannya Rp4.468.124.470.714,00 prosentase realisasi 63,21%. Sisa anggaran Rp2.600.572.732.286,00.

Realisasi anggaran pelaksanaan program. Program dukungan manajemen Rp1.435.765.609.000,00 realisasi anggaran Rp890.755.419.704,00 62,04%. Sisanya Rp545.010.189.206,00.

Untuk program Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi Rp5.627.681.594.000,00. Realisasi anggaran Rp3.577.380.666.845,00, 63,56% untuk realisasi anggaran prosentasenya dua triliun. Untuk sisanya Rp2.050.300.927.155,00.

Total untuk pagu anggaran Rp7.063.447.203.000,00 realisasi anggaran Rp4.468.136.086.639,00 dalam prosentase 63,21%. Sisanya Rp2.600.572.732.286,00.

Realisasi anggaran berdasarkan program, pagu anggarannya untuk belanja pegawai Rp400.700.156.000,00. Realisasi anggaran Rp356.668.142.518,00. Sisanya Rp44.031.213.482,00 prosentase realisasi anggaran 89,01%.

Untuk belanja barang pagu anggaran Rp6.570.304.619.000,00. Realisasi anggaran Rp4.053.034.869.791.000,00. Sisa anggaran Rp2.517.269.749.209,00 prosentasenya 61,69%.

Belanja modal, pagu anggaran Rp97.692.428.000,00. Realisasi anggaran Rp58.420.658.405,00. Sisa anggaran Rp39.271.769.595,00 prosentasenya 59,80%.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu pada tahun anggaran 2023 rekrutan Bawaslu provinsi periode 2023-2028 di 37 provinsi.

- Perekrutan dan pelantikan serta pengambilan sumpah janji Anggota Panwaslu luar negeri yang dilakukan di perwakilan RI.
- Kemudian perekrutan calon Anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028. ...(surara tidak jelas di menit 37.00) pengawasan Pemilu tahun 2024, penyusunan alat-alat peraga, alat kerja pengawasan kampanye tahun 2024, pengawasan calon anggota, pengawasan calon pendaftaran dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Pengawasan pemuktahiran daftar pemilih mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelurahan desa.

- Pengawasan penetapan evaluasi daftar pemilih sementara nasional.
- Kemudian penandatanganan MoU dan audiensi dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait pengawasan Pemilu.
- Peningkatan kapasitas bagi tenaga kumdu untuk membangun kesepahaman yang sama antara Bawaslu, Polisi dan Kejaksaan tentang tindak pidana Pemilu.
- Penyusunan dan penetapan Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, sidang penanganan pelanggaran peserta Pemilu.
- Penerimaan permohonan sengketa pengawas Pemilu yang tersebar di, ini maaf ini, di 38 (tiga puluh delapan) provinsi, terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyelesaian pendaftaran bakal calon Anggota DPD.
- Penyusunan dan penetapan keputusan Bawaslu yang mengatur petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses sebagai turunan dari Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Kemudian pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional dan PNS angkatan kelima di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJMN, RPJPN tahun 2025-2045.

RAPBN Bawaslu tahun anggaran 2024, pagu anggaran Bawaslu tahun anggaran 2024. Pagu Bawaslu Rp11.605.527.974.000,00. Surat bersama Kementerian Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Nomor S626 Nomor B644 tanggal 13 Juli tahun 2023.

- Program dukungan manajemen Rp1.362.618.246.000,00 40,60%.
  - Untuk operasional pegawai Rp553.195.891.000,00 46,42%.
  - Untuk operasional barang Rp632.576.823.000,00 12,9%.
  - Untuk *non* operasional barang Rp176.845.532.000,00.
- Program penyelenggaraan Pemilu dan dalam proses konsolidasi demokrasi Rp10.242.909.728.000,00 4,88%.
  - Untuk *non* tahapan Rp500.226.782.000,00 95,12%.
  - Untuk tahapan pengawasan Pemilu Rp9.742.682.946.000,00 berupa program prioritas nasional.

Target PNBPN Bawaslu tahun anggaran 2024. Bawaslu menargetkan Rp726.348.000,00. Lampiran surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor S2626 626 B644 tanggal 13 Juli 2023. Pagu anggaran Bawaslu tahun anggaran 2024 untuk prosentase dari Bawaslu sampai dengan panwas ad hoc 2,47%.

- Bawaslu Pusat Rp286.409.787.000,00 16,20%;
- Bawaslu Provinsi Rp1.880.545.468.000,00;
- Untuk Bawaslu kabupaten/kota sebesar 22,88% Rp2.655.460.849.000,00.

Untuk Panwaslu ad hoc 58,45% Rp6.783.111.870.000,00 kegiatan yang akan dilaksanakan:

Kegiatan program dukungan manajemen Rp1.362.618.246.000,00. Kegiatan program dukungan manajemen yang digunakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari atas:

- Pengelolaan keuangan BMN dan umum;
- Pengelolaan administrasi dan ESDM;
- Pemeriksaan;
- Pengendalian dan pengawasan internal; dan juga
- Pengelolaan data dan informasi.

Kegiatan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi Rp10.242.909.728.000,00 berupa kegiatan program penyelenggaraan Pemilu dan proses konsolidasi demokrasi yang digunakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Ad hoc terbagi atas dua:

- Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 satu putaran; dan
- Pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2024 daerah otonomi baru Provinsi Papua.

Kekurangan anggaran operasional tahun anggaran 2024 pagunya Rp1.186.772.714.000,00. Kekurangannya Rp268.115.190.000,00. Kebutuhan kekurangan merupakan gaji dan tunjangan PNS, uang kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota, honorarium PPNP Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, daerah operasional dan pengelolaan kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kekurangan anggaran *non* tahapan tahun anggaran 2024, pagu Rp677.072.314.000,00. Kekurangannya Rp517.856.516.000,00. Kebutuhan kekurangan berupa dukungan pengawasan Pemilu di pusat dan daerah, dukungan penanganan di pusat dan daerah dan dukungan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan di pusat dan daerah.

Kekurangan anggaran pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024 Rp632.671.847.000,00:

- Dukungan tahapan perencanaan penyusunan peraturan pengawasan Pemilu Rp220.367.579.000,00;
- Dukungan pengawasan tahapan logistik Rp67.661.825.000,00;
- Dukungan pengawasan tahapan masa kampanye Pemilu Rp102.572.920.000,00;
- Dukungan pengawasan tahapan masa tenang Rp22.641.315.000,00;
- Dukungan pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Rp192.341.717.000,00;
- Dukungan pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilu Rp26.197.302.000,00;
- Dukungan pengawasan tahapan pengawasan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Rp889.181.000,00.

Kekurangan dan kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, pada tahun anggaran 2024:

- Operasional kebutuhan anggaran 2024, Rp1.453.887.904.000,00.
- Pagu anggaran tahun anggaran 2024, Rp1.185.772.714.000,00.

- Kekurangan anggaran tahun anggaran 2024, Rp268.115.190.000,00.  
Kegiatan *non* tahapan Rp1.194.928.830.000,00:
  - Pagu anggaran tahun anggaran 2024, Rp677.072.314.000,00.
  - Kekurangan tahun anggaran tahun 2024. Untuk kegiatan tahapan Rp517.856.516.000,00.  
Kegiatan tahapan Pemilu Rp10.375.354.793.000,00:
    - Pagu anggarannya Rp9.742.680.946.000,00.
    - Kekurangan anggaran tahun 2024 Rp632.671.847.000,00.

Total anggaran tahun 2024 Rp13.024.171.527.000,00. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 Rp11.600.527.974.000,00. Kekurangan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Rp1.418.643.553.000,00.

Kekurangan dan kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024. Pada tahun anggaran 2024:

- Belanja operasional Rp1.453.887.904.000,00. Pagu anggaran Rp1.185.772.714.000,00. Kekurangan Anggaran Tahun 2024 Rp268.115.190.000,00.
- Belanja *non* operasional Rp11.570.283.623.000,00. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024, Rp10.419.755.260.000,00. Kekurangan anggaran Rp1.150.528.363,00 yang terdiri hasil regular, tahapan Pemilu dan tahapan pemilihan DOB Papua.

Kebutuhan anggaran tahapan pemilihan umum tahun 2024. Apabila terjadi putaran kedua, simulasi kebutuhan penganggaran untuk putaran kedua Rp4.651.666.169.000,00 yang berupa:

- Honorarium dan operasional Panwaslu ad hoc;
- Pengawasan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- Pengawasan dan pengadaan distribusi logistik;
- Pengawasan masa kampanye Pemilu;
- Pengawasan masa tenang; dan
- Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- Pengawasan tahapan hasil Pemilu.

Kemudian pada tahun 2024 ini ada penambahan anggaran 8% sebanyak Rp6.092.142.000,00. Pagu anggaran setelah penambahan 8% untuk gaji pegawai sebesar Rp11.611.620.116.000,00.

Demikian.

**Pimpinan Komisi II yang terhormat,**

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih saudara Ketua Bawaslu atas penyampaiannya.

Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI, apabila ada yang perlu ditanyakan, membutuhkan penjelasan atau juga membutuhkan klarifikasi tetapi ini sudah hampir jam 15.30, saya perpanjang dulu ya, sampai jam 16.00.

**(RAPAT: SETUJU)**

Dari sayap kanan Pak Haruna, Pak Toha, Pak Muraz, Pak Ongku, sayap sini cukup?

Oh, Pak Endro penting, diwakili Pak Endro ya.

Silakan Pak Haruna.

**F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

**Yang kami hormati Pak Ketua, dan**

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Oh, Pak Gaus terakhir.

**F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):**

**Ketua Bawaslu,  
Ketua KPU dan seluruh jajaran teman-teman,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya langsung Pak, ini tadi dari paparan KPU, anggaran *point* ketiga yaitu anggaran belanja *non* operasional. Ini dari dua Bawaslu dan KPU, Pak tidak ada yang menyebutkan asuransi jiwa, kesehatan, asuransi kematian, seluruh pelaksana operasional Pemilu dan Bawaslu. Mau diselipkan di mana ini Pak?

Kalau diselipkan, kalau menurut saya di anggaran yang Rp11 triliun *non* operasional, kalau memungkinkan. Itu untuk di KPU, Pak.

Kalau untuk di Bawaslu anggaran bisa diselipkan di ad hoc, kalau memungkinkan juga. Kalau dua-duanya tidak memungkinkan ya minta tambahan. Pak Ketua di atas Pak Banggar sebelah kanan saya, sebelah depan saya Pak Ketua, sebelah kanan Banggar, jadi lengkap Pak, yang mengusulkan ini Anggota, saya kira selip itu Pak khusus Anggota, ini dua saran ini Pak karena sering terjadi.

Pertama anggaran kesehatan Pak, kan perlu, perlu madu, perlu telur, perlu ini Pak banyak, perlu nutrisi. Saya lihat Bawaslu dan KPU tidak ada yang menyinggung tentang asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, asuransi kematian. Ini yang kematian rahasia Allah Pak, bagaimana keluarganya. Apalagi ini pengalaman kemarin pemilihan bersama Presiden, DPR satu, DPR dua dan kabupaten/kota, ini luar biasa kerja marathonnya Pak.

Saya kira itu saja *point* satu Pak Ketua. Tolong Pak Bawaslu dan KPU cari solusinya, menyelipkan di mana, sebelah kanan atau sebelah depan atau di ad hoc atau di anggaran *non* operasional.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Pak Haruna.

Silakan Pak Toha.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

Sedikit kok, langsung saja.

Saya itu kalau sosialisasi Bawaslu sama KPU antara lain juga mengundang PPK, kalau Bawaslu undang Panwaslu atau Panwascam. *Nah*, di sana ternyata kita tidak hanya sosialisasi akan tetapi banyak mendengar aspirasi. *Nah*, aspirasi perlu saya sampaikan kepada KPU dan Bawaslu Pusat, kalau kita mendengar aspirasi mereka.

Saya selalu menyampaikan yang sejuk-sejuk bahwa nanti KPU sama Bawaslu akan meningkatkan kesejahteraan kalian. Kalau KPU saya sampaikan juga apa namanya tunjangan kesehatan itu tadi atau apa namanya asuransi kesehatan. Kalau Panwascam kita sampaikan ada kenaikan honor.

*Nah*, ini saya akan itu karena kalau honor pengawas desa dan kelurahan, *eh* PKD ya, pengawas kelurahan dan desa itu hanya seribu seratus, satu juta serratus. Kalau dihitung per hari cuman Rp35.000,00 kalah sama tukang batu. *Nah*, ini menjadi persoalan.

Kalau Panwascam kalau enggak salah Rp1.900.000,00 ya, Rp1.900.000,00 pun kalah dengan apa namanya UMK atau UMR di tempat atau di wilayah ini, termasuk KPU, PPK-nya juga samalah dengan UMR, begitu. *Nah*, ini menjadi persoalan menurut saya.



Oleh karena itu penambahan anggaran ini satu keniscayaan atau kewajiban atau keharusan bagi kita semua untuk mendukung dan memperjuangkan itu Pak, meskipun di sana kemarin ternyata PPK itu lebih tinggi dari pada Panwascam, ini menjadi persoalan juga.

Saya enggak tahu apakah, apakah dibegitukan karena PPK ini menyelenggarakan ya. Kalau saya tanya itu PPK kok lebih tinggi Pak? Seharusnya PPK tidak lebih tinggi, karena PPK itu hanya belajar undang-undang PerKPU Pak.

Kalau Panwascam itu memperlajari dua, undang-undang PerKPU sama Perbawaslu iya, karena dia harus mengawasi apa yang dilaksanakan oleh PPK atau KPU di kabupaten/kota. Tetapi omongannya PPK balas ganti, Panwascam itukan hanya *ngawasi* Pak, kan hanya *ngawasi, moso* lebih tinggi dari yang menyelenggarakan.

*Nah*, ini jadi persoalan, meskipun itu kita klarifikasi kita dan kita berhasil supaya tidak terjadi ketegangan di antara Bawaslu dan KPU. Itu Pak.

Jadi nanti saya mohon dari penambahan-penambahan yang saya lihat tadi mohon minta kejelasan untuk penambahan honor, honor di honorarium di PPK, kemudian Panwascam. Nantikan Bawaslu itu akan merekrut atau Panwascam itu akan merekrut Panwas Desa sudah, Panwas TPS ya Pak ya. *Nah*, inikan juga harus ada, harus ada biaya yang lebih tinggi juga. Itu saja Pak, jadi mohon ada perhatian kita semuanya, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja.

Kemudian yang kedua, apakah ini wacana percepatan Pilkada maupun percepatan pendaftaran Pilpres ini ada dampaknya dengan penganggaran? Kalau enggak ada dampaknya ya kita tidak akan membahas di sana nanti ketika nanti kita pembahasan dengan Mendagri tentang percepatan Pilkada maupun percepatan pendaftaran Pilpres.

Saya pikir itu Pak, saya mohon, saya memberikan saran kepada KPU dan Bawaslu kalau saya lihat sekarang duduknya baik-baik saja. Secara fisik kelihatan baik-baik saja tetapi diberita-berita ngeri saya Pak, di berita ngeri ini. Bawaslu begini, KPU begini dan sebagainya. Ini supaya di ini.

Tetapi saya lihat Mas Hasyim tadi sudah berempati Mas Toto sakit itu, itu luar biasa di-di apa, dipertemuan di apa namanya di forum semacam ini. Artinya mereka tidak ada apa-apa, semoga tidak apa-apa dan bisa bekerja sesuai dengan ketentuan, kaidah, peraturan dan undang-undang yang telah disepakati, ditetapkan.

Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Cukup ya? .

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Pak Toha.

Berikutnya silakan Pak Muraz.

**F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Ketua beserta para Anggota yang saya hormati,  
Pak Ketua KPU beserta jajaran,  
Pak Kabawaslu beserta jajaran,**

Terima kasih atas kesempatan, tadi dijelaskan baik oleh Pak Ketua KPU maupun Ketua Bawaslu bahwa total anggaran untuk Pemilu ini dua-duanya kurang ya, demikian juga per tahunnya. Termasuk untuk tahun 2024 usulan KPU dari 44,7 sekian triliun dialokasikan Rp27,39 triliun. Apalagi KPU total kurang dari permohonan 76, alokasi sampai 2024 Rp51,16 triliun. Kurangnya Rp25,49 triliun atau 33,26%. Saya kira luar biasa kurangnya ya.

Pertanyaan saya untuk KPU dan Bawaslu sekaligus. Apakah dengan anggaran sekian, itu yakin seluruh tahapan Pemilu ini akan dapat dilaksanakan secara baik dan lancar, tidak ada masalah?

Yang kedua, sama ini. Dulu membahas kenaikan honor ya untuk di KPU maupun untuk di Bawaslu, jadi tingkat provinsi, kabupaten/kota. *Nah*, ini juga saya mohon informasi apakah mereka naiknya sesuai perencanaan awal atau dikurangi juga tiga puluh tiga koma sekian persen, berapa ini.

Kemudian ini Pilpres tahap dua tidak dianggarkan, apa yakin Pilpres akan satu putaran begitu, ya? Kalau tidak dianggarkan bagaimana ini penanggulangannya nanti kalau ada Pilpres putaran kedua? Sedangkan perubahan APBN kan belum dibahas.

Yang berikutnya Pak, KPU untuk 2023 sampai hari ini realisasinya baru 57,49%. Bawaslu juga baru 63,21%, *nah* ini apa kendalanya? Apakah uangnya dari pemerintah tidak diberi atau memang uangnya tidak dipergunakan? *Nah*, jadikan kita bilang anggarannya kurang negative tetapi uang yang ada kok enggak dihabiskan begitu.

Sekarang sudah triwulan ketiga ya, harusnya 75% begitu, jadi Pemerintah juga melihat kekurangan itu. *Nah*, ini apa? Apakah uangnya enggak keluar atau memang ada yang disimpan untuk diakhir tahun penganggarannya?

Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Pak Muraz.

Berikutnya silakan Pak Ongku.

**F-PD (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Ketua KPU,  
Ketua Bawaslu dan beserta jajarannya semua,  
Kawan-kawan Komisi II yang saya hormati,**

Soal anggaran sebenarnya sudah ditanya semua sama teman-teman tadi Pak tentang pertanyaan yang diinventarisir, jadi saya enggak tanya lagi soal anggaran Pak.

Jadi, saya sekarang bertanya tentang sama seperti Pak Toha. Ketika kita melakukan sosialisasi di lapangan yang terjadi adalah ada juga aspirasi-aspirasi ya seperti yang disampaikan Pak Toha. Tadi saya juga mengajak PPK dan PPS untuk hadir di dalam sosialisasi baru-baru yang lalu, itu antara lain adalah pertanyaan yang muncul.

Banyak pertanyaan kepada mereka yang muncul adalah bagaimana kalau nanti tentang adanya pemilih yang bertambah jumlahnya? Karena DPT kan sudah keluar. Sementara setiap hari ada orang yang meninggal barangkali, setiap hari ada orang yang bertambah usianya ya.

Bahkan ada pertanyaan yang masuk ke saya itu kalau Pemilu itu tanggal 14 Februari, pada tanggal 13 Februari usianya sudah 17 tahun, bagaimana itu? Apakah dia tidak berhak untuk memilih? Kalau berhak bagaimana caranya? Diakomodir di mana dan DPT ini apakah masih terus di-*update* atau bagaimana.

Kemudian yang kedua adalah mengenai pemilih yang dari luar, misalnya yang urban, yang datang, yang bekerja disatu tempat ya. Dia, penduduknya bukan di situ tetapi dia mau memilih di situ. Sementara surat suara itu kelebihan hanya 2%, kalau ternyata mereka lebih yang datang, apakah mereka kehilangan hak juga? Ini bagaimana juga mengakomodasi keadaan seperti ini.

Yang ketiga, itu kenyataan berdasarkan Pemilu-pemilu sebelumnya di perkebunan-perkebunan pada umumnya dan di perusahaan-perusahaan, itu Pemilu itu boleh dikata hampir tidak ada. Artinya ya itu seperti noken lah sudah. Jadi, sudah ada instruksi dari atasannya apalagi kalau seandainya ada pula anggota daripada perusahaan itu yang ikut caleg.

*Nah*, saksi-saksi yang ada itu tidak perlu lagi ada di sana. Karena bahkan pernah terjadi katanya jam 8 pagi saja sudah selesai Pemilu, karena semua orang sudah dicoblos. *Nah*, ini bagaimana ketentuan mengenai hal ini?

Memang ini hak semua orang, hak daripada yang pemilik perusahaan, hak pemilihnya untuk memilih dan seterusnya dan juga menyerahkan haknya kepada orang lain boleh-boleh saja. Tetapi karena kita *one man one vote*, bagaimana ini? Saya enggak bisa jawab ini Pak ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.

Dan yang terakhir dari saya adalah saya melihat jumlah anggaran tadi yang lumayan besar menurut saya dari tahun 2022 sampai dengan nanti 2024. Itu dari usulan yang ada kan dari KPU itu Rp76 triliun atau Rp77 triliun ya, ditambah Bawaslu Rp11 triliun. Berarti sekitar Rp87 triliun yang akan dihabiskan uang negara untuk Pemilu ini.

*Nah*, bagaimana kita bisa menghadirkan Pemilu yang berkualitas dengan uang sebesar itu sementara kita lihat di lapangan sekarang prakteknya itu sangat syarat dengan manuver-manuver *money politic*. Barangkali ini kepada Pak Bagjanya atau kawan-kawan dari Bawaslu ya, ini nanti sanksinya bagaimana? Apakah untuk *on the spot* atau bagaimana ya?

Karena ini banyak sekali sekarang ini yang lazim terlihat di lapangan itu mengumpulkan data. Satu data harganya sekian ya, satu data harganya sekian, dikumpulkan sebanyak mungkin dan dijanjikan nanti pada hari H akan dikasih lagi sekian dan seterusnya dan seterusnya. *Nah*, ini bagaimana Panwas mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini.

Kita sayang juga kalau seandainya anggaran Pemilu yang besar ini kita habiskan uang negara sebesar Rp87 triliun kurang lebih tetapi kualitas Pemilu yang kita hadirkan itu sangat rendah, meskipun secara kuantitas barangkali nanti bagus, ya bisa jadi tingkat partisipasi meningkat dari 80% menjadi 85% tetapi kualitasnya itu menurun.

Nah, ini barangkali menjadi pertanyaan saya mohon kira-kira tanggapannya.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Pak Ongku.

Silakan Pak Endro.

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya langsung saja, sedikit saja satu menit. Kita sudah melakukan konsinyering cukup panjang lebar dan mendalam, begitu di situ sudah ada notulensi rapat, tetapi yang tadi disinggung masalah sosialisasi dan sebagainya, asuransi. Itu saran saya apa yang di apa, didiskusikan di konsinyering kemarin itu dijawab saja, kalau oke iya jalan.

Sudah saya pikir ini enggak ada masalah supaya tidak berpanjang lebar, inikan enggak ada bedanya, sedikitlah perbedaan. Itu saja Pimpinan, jadi apa, tertulis seperti Kementerian ATR/BPN kan juga melampirkan jawaban hasil konsinyering itu loh.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Pak Endro.

Berikutnya Pak Gaus, Buya.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Ketua KPU beserta komisioner, beserta Sekjen dan jajaran,  
Ketua Bawaslu, komisioner beserta, Sekjen beserta seluruh jajaran,  
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Pertama saya menyikapi terhadap realisasi anggaran tadi sudah diungkapkan bahwa KPU 57,49 sedangkan Bawaslu 63,21. Sekarang ini bulan September. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan terkesan anggaran yang sudah dialokasikan saja terjadi sisa anggaran. Jangan sampai terjadi paradoksi kedua lembaga ini baik KPU, Bawaslu menyatakan kekurangan anggaran. Tentu saya me-*warning* agar maksimalisasi pemanfaatan dan pemakaian anggaran sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan, harus maksimal dalam capaiannya, itu yang pertama.

Yang kedua adalah KPU menyampaikan bahwa usul anggaran secara *totally* itu kan 76 Pak Hasyim ya, 76,656. Kalau kita gelondongan bicara tentang berapa anggaran yang dibutuhkan oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu? Adalah 76 koma sekian.

Lalu dalam pemakaian anggaran itukan ada tahapan-tahapan, ada tahun anggaran. Lalu dikatakan di bawahnya bahwa KPU kalaulah seandainya disahkan anggaran 2024 yang nilainya itu adalah sebanyak 27 yang diakomodir, total yang dialokasikan itu baru 51 T lebih, ini dikatakan tadi 51,164. Saya merinci, saya melihat itu-itu tadi saya lihat, saya kalkulasikan. Kenapa sampai 51 itu, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah atau dan Badan Anggaran dirinci, di tahun 2022 yang diusulkan adalah 8 T yang di apa namanya, dialokasikan oleh Badan Anggaran tiga koma sekian.

Demikian juga yang diusulkan pada tahun 2023 adalah 23 T, yang dialokasikan 20 T. Kemudian 2024 yang diusulkan adalah 44, yang direalisasikan oleh Badan Anggaran adalah, badan *anu*, Badan Perencanaan Pembangunan beserta Menteri Keuangan adalah 27 T, ini yang 2024, karena apa? Karena belum dibahas oleh Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan kan begitu. Sehingga proyeksinya adalah lima puluh satu koma sekian, kurang dua puluh empat koma sekian.

Lalu pertanyaan saya adalah bahwa anggaran kita inikan bersifat tahunan. Yang 2022 sudah dianggarkan, yang jumlahnya itu adalah delapan, yang dialokasikan cuma 3,5. Bagaimana tentang persoalan di 2022 itu terhadap kebutuhan dan realisasinya, karena Pemilu ini ada tahapan-tahapannya dan kita sudah sepakati bahwa tahapan Pemilu itu dimulai dari 14 Juni 2022. Dan ketika itu anggaran Pemilu sudah dialokasikan dan juga sudah dicairkan.

*Nah*, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada persoalan terhadap anggaran di 2022, 2023? Karena apa? Karena antara yang diusulkan dengan yang dialokasikan jauh berbeda.

Apakah ada di tahun 2022 itu tahapan-tahapan yang tidak terlaksana akibat bagaimanapun setiap kegiatan, setiap program harus di *back up* oleh anggaran. Atau persepsi saya, KPU terpaksa merasionalisasikan atau menyesuaikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

*Nah*, ini maksud saya adalah jangan sampai pelaksanaan Pemilu ini akibat terjadi anggaran yang jauh drastis turunnya berakibat dari pelaksanaan. Yang maaf dalam tanda kutip "morat-marit". Tetapi menurut persepsi saya karena 2022 sudah jalan, tahapan Pemilu sudah dilalui. Kemudian tidak ada persoalan, seperti yang saya sampaikan, menyesuaikan, merasionalisasikan dan lain sebagainya.

Rasionalisasi yang dilakukan itu saya lihat memang bahwa ketika di tahun 2022 itu anggaran itu hanya 43% yang dianggarkan oleh Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan. Dan di dalam tahun 2023 sudah ada peningkatan, dari kebutuhan yang diminta itu adalah sebanyak 23, rasional juga Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan kebutuhan yang diminta 23 dialokasikan 20 T. Artinya jumlahnya itu tidak lagi 30, 43% tetapi adalah 84% yang dialokasikan.

Kenapa ketika 2023 itu tahapan-tahapan Pemilu sangat syarat dengan program dan kegiatan. Yang ingin saya tanyakan adalah artinya adalah sama bagaimana pula dengan persoalan ini. Lalu karena jumlah glondongan itu adalah 74

yang baru diakomodir kalau mudah-mudahan yang 27 T juga direalisasikan oleh Badan Anggaran, jumlahnya menjadi 51.

Jadi, artinya jangan-jangan di, saya beranggapan yang 2022 sudah selesai tidak ada masalah. 23 dalam perjalanan, ada masalah apa enggak? Apa yang berakibat daripada kekurangan anggaran yang dialokasikan terhadap program dan kegiatan, itu yang berikutnya.

Kemudian yang tragis memang, saya enggak tahu ini apakah yang 2024 ini yang dialokasikan oleh Bappenas bersama Menteri Keuangan, dari 44 yang diajukan itu hanya 27 yang disetujui?

Apakah, tadi dikatakan dikertas kerjanya nomor berapa ini, halaman tiga, bahwa pagu anggaran 2024 tidak termasuk anggaran Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Inikan sesuatu yang sangat tragis menurut hemat saya, karena kita lihat dalam prespektif sekarang ini calon Presiden itu bukan dua orang, bukan dua pasang calon tetapi adalah tiga pasang calon. Dan saya yakinkan putaran Pilpres dan Wakil Presiden saya pastikan tiga, eh dua putaran. Ini bagaimana pula menyiasati ini?

Sebab kalau anggaran ini sudah disahkan, tentu tidak mungkin bagaimana cara. Ya pengalaman saya, saya di selama ini yang saya pahami saya tiga periode di DPRD Sumbar, di Badan Anggaran. Tentu untuk melaksanakan program dan kegiatan harus ada perencanaan dan harus ditetapkan di Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan. Padahal kalau memang betul ini yang disampaikan KPU bahwa KPU menyatakan, mensinyalir bahwa anggaran yang 27 nilainya itu tidak termasuk anggaran pelaksanaan Pilpres manakala terjadi pada putaran kedua.

Sebab saya juga punya asumsi juga, pihak Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan beranggapan bahwa yang 27 T itu sudah termasuk, tentu saya harus meng-*cross check* juga tentang apa yang disampaikan oleh KPU tentang hal ini.

Kemudian yang terakhir KPU, Bawaslu juga tadi sudah saya singgung bahwa dikatakan bahwa ada kekurangan anggaran, tetapi kedua-dua kelembagaan ini tidak mencantumkan, tidak meminta kepada kami agar ada penambahan anggaran akibat penurunan dari yang diminta.

Yang diminta sekian, yang diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Bappenas hanya sekian, terjadi kekurangan. Hanya menyampaikan, tetapi harusnyakan juga disampaikan akibat daripada ini. Dan itu akhirnya kami KPU dan Bawaslu berdasarkan ini meminta tambahan anggaran untuk kegunaannya adalah ini dan itu.

Lazimnya kami membahas itu dengan Kementerian dan Lembaga adalah seperti itu. Kalau ini hanya sekedar laporan, kemudian tidak menyampaikan perlu ada penambahan anggaran akibat daripada yang saya sampaikan tadi.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Gaus.

Terakhir Pak Riswan Tony.

**F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Bapak Ketua KPU dan Sekjen beserta jajaran,  
Bapak Ketua Bawaslu,  
Pak Sekjen beserta jajaran,**

Saya cuma mengingatkan saja sedikit Pak Sekjen, dua-dua Sekjen. Waktu kita konsinyering kemarin terhadap keikutsertaan Komisi II, dalam konteks Bimtek PPS atau KPPS dan Panwas TPS atau Kanta. Pak Sekjen menampung tetapi akan dibicarakan dengan komisioner. Kami berharap ini bisa ikut partisipasi walaupun tidak semua, paling tidak Anggota Bawaslu atau KPU Kabupaten/Kota bisa hadir.

Kita sebagai Komisi II ya, karena ini anggaran di ini, Pak Hasyim maupun Pak Bagja itukan anggaran di 2024. Januari kitakan di Bawaslu itu akan mengadakan Bimtek untuk Panwas atau 100 orang per-desa atau 100 orang per-kecamatan untuk Panwas TPS, maupun KPPS, itukan akan diadakan Bimtek. Paling tidak kami apa sebagai pembicara atau sebagai pembuka acara, kami serahkan kepada KPU maupun Bawaslu, paling tidak ada partisipasi kami untuk bicara di dalam forum tersebut.

Itu saja Ketua. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Pak Riswan Tony.

**Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,**

Itu beberapa pertanyaan, pendalaman dan juga mungkin klarifikasi dari para Anggota Komisi II DPR RI.



Sebelum saya persilakan Ketua KPU untuk meresponnya, saya perpanjang sampai jam 16.15.

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang respon yang pertanyaan sama, apa langsung saja, jadi jangan satu persatu.

Silakan Saudara Ketua KPU.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Bapak/Ibu yang telah memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang kami jelaskan.

Yang pertama kepada Bapak Haruna, Bapak Muhammad Toha dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Pak Muraz, Pak Ongku, Fraksi Partai Demokrat, kemudian Pak Endro PDIP, kemudian Pak Guspari Gaus Fraksi PAN, Pak Riswan Tony dari Fraksi Partai Golkar.

Yang pertama, soal asuransi. Jadi sejak Pemilu 2019 anggaran untuk asuransi bagi badan ad hoc tidak dapat dimasukkan, karena memang dalam apa namanya aturan Menteri Keuangan demikian. Jadi yang dapat dimasukkan adalah hanya santunan.

Namun demikian terhadap instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, instruksi itu kepada Menteri-menteri dan juga kepala daerah, gubernur, bupati, walikota se-Indonesia yang di dalam instruksi Presiden tersebut masuk dalam ruang lingkup tenaga kerja yang harus diberikan jaminan sosial di dalamnya adalah penyelenggara Pemilu.

*Nah*, oleh karena itu kami ber kirim surat kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Pemda masing-masing untuk dapat dianggarkan masuk kedalam APBD untuk anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan kategori penyelenggara Pemilu. Ini yang kami lakukan.

Kami juga berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri supaya kemudian Menteri Dalam Negeri juga memberikan penegasan tentang pemberlakuan Impres No.2 2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi di dalamnya penyelenggara Pemilu. Itu yang dapat kami tempuh karena memang dari segi anggaran tidak dimungkinkan untuk apa namanya anggaran untuk asuransi.

Yang kedua, sesungguhnya di dalam anggaran KPU penyelenggaraan Pemilu untuk usulan yang jumlahnya Rp76,6 triliun tetapi realisasinya 50 sampai saat ini Rp51,1 triliun itu di dalamnya sudah masuk untuk apa namanya Pilpres dua putaran.

Jadi, dari segi perencanaan sudah dimasukkan, dari segi usulan sudah dimasukkan. Seingat kami di dalam Rp76,6 triliun sudah termasuk di dalamnya

alokasi anggaran untuk Pilpres putaran kedua. Namun, untuk masuk kedalam alokasi DIPA belum dimasukkan oleh Pemerintah.

Intinya bahwa kami dari segi penyelenggara Pemilu, tentu dalam perencanaan mempertimbangkan banyak hal karena dalam Pemilu demokratis itu kan *unpredictable result* hasilnya enggak bisa diprediksi. Apakah nanti calonnya berapa pasangan dan seterusnya kami harus mempersiapkan.

Sekiranya kemudian faktanya terjadi Pilpres putaran kedua, bahwa nanti alokasinya sudah dijanjikan Pemerintah kalau memang terjadi Pilpres putaran kedua sudah disiapkan dari besaran yang sudah diajukan oleh KPU.

Kemudian yang ketiga, soal honor. Yang pertama, kami pernah menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa pada waktu Pemilu Presiden, Pemilu 2019 serentak untuk memilih lima jenis Pemilu itu honor Anggota KPPS itu besarnya Rp550.000,00.

Kami sampaikan bahwa pengalaman di 2014 Pemilu legislative dengan Pemilu Presiden dilaksanakan di waktu yang berbeda, April dan Juli, untuk Pemilu legislative Anggota KPPS Rp550.000,00 honorinya, untuk Pilpres Rp550.000,00 kalau kita anggap bahwa Anggota KPPS-nya sama itu besarnya adalah Rp1.100.000,00. Nah, pertanyaannya kenapa untuk Pemilu serentak yang 5 jenis Pemilu itu hanya Rp550.000,00?

Kemudian kita ajukan besarnya seingat saya Rp1.500.000,00 dan kemudian disetujui melalui surat Menteri Keuangan Nomor-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang kemudian besarnya untuk honor Anggota PPK, Ketua Rp2.500.000,00 per-bulan, kemudian Anggota Rp2.200.000,00. Kemudian untuk Anggota PPS Ketua Rp1.500.000,00 per-bulan, Anggota Rp1.300.000,00. Untuk KPPS Ketua adalah Rp1.200.000,00, kemudian untuk Anggota Rp1.100.000,00 artinya sudah kenaikan dibanding Pemilu 2019.

Kemudian juga untuk panitia pemilihan di luar negeri. Untuk Ketua Rp8.400.000,00 per-bulan, untuk Anggota Rp8.000.000,00 per-bulan. Jadi sudah ada kenaikan yang relative signifikan untuk apa namanya penyelenggara Pemilu badan ad hoc.

Di dalam surat tersebut lampirannya juga menyebut tentang santunan kecelakaan kerja badan ad hoc. Kami bacakan saja, kalau meninggal dunia *naudzhubillah min dzalik* moga-moga tidak terjadi, itu adalah per-orang adalah Rp36.000.000,00 kemudian untuk cacat permanen Rp30.800.000,00, kemudian luka berat Rp16.500.000,00 dan kemudian untuk luka sedang Rp8.250.000,00. Kemudian untuk bantuan biaya pemakaman per-orang Rp10.000.000,00. Jadi, dalam surat Menteri Keuangan tersebut sudah ada rinciannya untuk pagu anggarannya dan juga satuan anggarannya juga besaran kesana. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk soal honor tadi.

Kemudian, soal pemilih. Yang pertama, pada dasarnya sumber data yang digunakan oleh KPU untuk menyusun, untuk pemuktahiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih. Ada dua, yang pertama adalah DP4 (Data Penduduk

Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah untuk dalam negeri dari Kementerian Dalam Negeri, yang untuk luar negeri dari Kementerian Luar Negeri. Di dalamnya sudah memuat tentang, karena yang punya *data base* kependudukan adalah Pemerintah.

Di dalam sudah memuat yang namanya potensi pemilih berarti sudah ada nama-nama berdasarkan data kependudukan tersebut yang nanti pada tanggal 14 Februari sudah berumur 17 tahun. Sehingga di dalam daftar pemilih itu pemilih potensial sudah dimasukkan di dalam daftar pemilih, karena pada dasarnya menuang 17 tahun genapnya itu pada hari pemungutan suara. Walaupun pada waktu pemuktahiran daftar pemilih belum masuk 17 tahun.

Kalau sudah masuk DP4 dalam arti sudah bisa diprediksi yang bersangkutan genap 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024, maka dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan KPU kabupaten/kota pada tanggal 20 dan 21 Juli 2023 dan direkap secara nasional oleh KPU pusat tanggal 2 Juli 2023.

Selanjutnya, kami juga menyiapkan TPS lokasi khusus, ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dalam rangka tadi mengakomodir, memberikan jaminan kepada warga Negara kita yang pada hari H pemungutan suara tidak berada di tempat domisili di mana yang bersangkutan terdaftar di DPT, pekerja tambang, pekerja perkebunan, *out source*, kemudian warga binaan lembaga permasyarakatan, santri-santri di pondok pesantren, sekolah asrama, mahasiswa yang berada di luar kota, itu kita siapkan TPS lokasi khusus.

Ini kalau TPS lokasi khusus maka di dalamnya ada DPT untuk lokasi khusus, sehingga dapat disiapkan alokasi surat suaranya. Jadi, ada cara berpikinya TPS lokasi khusus adalah pindah milih tetapi yang memindahkan KPU, karena sejak awal sudah bisa diidentifikasi berdasarkan NIK dan seterusnya. Nama-nama yang bersangkutan itu namanya dihapus dari DPT ditempat asal supaya kemudian dari segi penyediaan surat suara tidak menimbulkan hitungan ganda penyediaan surat suaranya.

Tetapi walaupun demikian kita juga bisa memprediksi orang kemudian melakukan mobilisasi pindah domisili atau karena tugas pada hari H baru bisa mengurus, itu menurut Undang-Undang Nomor 7 2017 mengurusnya paling lambat adalah 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Tetapi kemudian ada keputusan Mahkamah Konstitusi lebih didekatkan dengan hari pemungutan suara, pindah milihnya itu adalah maksimal tujuh hari sebelum hari pemungutan suara. Ini yang kemudian pindah milih yang seperti ini tentu kami tidak bisa menyediakan surat suara sebagaimana TPS lokasi khusus yang sudah bisa diprediksi sejak awal.

Saya kira itu, termasuk untuk misalkan pemilih di dalam maupun luar negeri. Pindah milih juga menggunakan sistem yang sudah dibangun oleh KPU termonitor antara KPU dengan pemilih di TPLN diluar negeri. Jadi, untuk DPT jumlah pemilihnya adalah 204.807.222 orang. Untuk yang regular TPS regular sebanyak 202.652.388 pemilih yang diakomodir di dalam TPS lokasi khusus sebanyak 404.360 orang.

Yang ketiga, di TPS itu ada yang namanya daftar pemilih khusus menurut undang-undang Pemilu. Ya ini, yaitu adalah daftar pemilih untuk mencatat, mengakomodir pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam DPT tetap diakomodir di dalam DPK. Di TPS ketika dia hadir. Kesempatannya adalah untuk memilih tentu berbeda dengan pemilih yang DPT dan pemilih DPTP atau pemilih pindahan. Kesempatan yang terakhir yaitu satu jam terakhir sebelum TPS ditutup. Kalau TPS beroperasi jam 7.00 sampai jam 13.00 maka kesempatan memilihnya adalah antara jam 12.00 sampai jam 13.00.

Tentang ketersediaan surat suara pada prinsipnya pemilih DPK ini adalah domisilinya sama dengan TPS di mana dia berada akan *nyoblos*. Dan kalau misalkan katakanlah dia hadir di TPS satu tetapi surat suaranya sudah tidak tersedia nanti kita pindahkan ke TPS lain yang masih tersedia surat suara. Syaratnya adalah alamat KTP sama dengan TPS di mana dia *nyoblos* di daftar pemilih khusus.

Saya kira demikian. Yang terakhir pertanyaan, apakah anggaran yang sudah ada ini, itu sudah apa mencukupi untuk kegiatan pemungutan, kegiatan pemilu, pada dasarnya sudah mencukupi.

Kalau di tahun 2022 kenapa yang diajukan usulannya Rp8 triliun tetapi alokasi hanya Rp3,5 triliun kok cukup? Karena di dalamnya ada renovasi kantor, kemudian bangun kantor, bangun gudang dan seterusnya.

Mohon maaf memang kami sengaja masukkan karena apa? Biasanya dalam konteks anggaran perhatian terhadap kelembagaan, itu kalau musim Pemilu, kalau enggak musim Pemilu kadang-kadang tidak diperhatikan, maka kami ajukan anggarannya. Bahwa kemudian dipenuhi atau tidak, tentu kami tetap apa namanya? Memohon supaya, apa istilahnya? Ada situasi-situasi yang kantornya memang sangat diperlukan untuk direnovasi, untuk dibangun dan seterusnya.

Bapak, Ibu di, iya Pak memang pengalamannya begitu Pak.

**Bapak/Ibu,**

Di Dapil, saya kira masih menemukan kantor-kantor KPU yang masih sewa di ruko-ruko. Ya apa boleh buat Pemilu harus jalan terus. Maka di tempat manapun KPU harus tetap beroperasi. Sebagaimana di DOB waktu itu karena KPU provinsi sebelum terbentuk KPU-nya dikerjakan oleh KPU induk, sekretariatnya juga sekretariat KPU provinsi induk, harus berkantor. Maka daripada menyewa di mana-mana maka kita siapkan ruangan di kantor-kantor KPU kabupaten/kota Ibukota provinsi daerah apa namanya? DOB tersebut.

Kemudian untuk realisasi anggaran ternyata pagu anggaran tahun 2023 sebanyak Rp20 triliun sekian miliar itu, realisasi anggarannya sebesar 57,49% atau baru sebelah triliun enam ratus empat puluh lima miliar dan seterusnya, karena untuk pengadaan logistik untuk tahun anggaran 2023 belum dibayarkan Pak. Nanti kalau sudah dibayarkan ya terserap semua.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih Saudara Ketua.

**F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):**

Ketua-ketua,

Tadi.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Oh, yang itu, terakhir.

**F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):**

Tadi mau dijawab.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Yang soal sosialisasi, apa Bimtek.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Kami nanti akan bahas dulu Pak. Kalau sosialisasi saya kira masih dapat dipermaklumkan ya. Tetapi kalau sudah Bimtek itukan kemudian Bapak/Ibukan Dapilnya beda-beda. Kalau di sebuah Dapil nanti kesempatannya hanya satu partai sementara Bapak/Ibu dari partai yang lain yang kebetulan bukan Komisi II kan tanda tanya Pak. Sebagai kemudian setara Pak, saya kira lebih baik di konteks sosialisasi saja.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Terima kasih.

Berikutnya silakan Ketua Bawaslu.

**F-PG (DRS. H. RISWAN TONY, DK):**

Entar dulu Ketua.

**Ketua,**

Ini Pak Ketua KPU, Bawaslu, itukan rekrutmen di bawahpun juga ada aktivitas kitalah paling tidak sedikit, kan kita di bawah itu juga sudah bicara dengan beberapa teman-teman KPU, KPU Kabupaten maupun Bawaslu Kabupaten. Mereka juga sangat senang kalau kita sebagai *keynote speak* atau apa di situ. Dalam konteks inikan sosialisasinya resmi Pak. Sebagai Anggota Komisi II Pak bukan partai, Pak. Sebagai Anggota Komisi II, dalam konteks mensosialisasikan, apa? Bimtek tadikan. Kami juga bisa memberi arahan untuk teknis atau paling tidak kesejahteraan tadi bisa juga kita informasikan, begitu Pak. Terhadap anggota KPPS yang akan dilakukan Bimteknya Pak, tidak lebih, kami sebagai itu saja, pembuka atau apa begitu.

Terima kasih Ketua.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

**Interupsi Pimpinan,**

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Kenapa, Pak Gaus.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Memperjelas apa yang disampaikan oleh Pak.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Harusnya sudah jelas itu, tinggal KPU ke kita.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Enggak, saya merasakan juga maksud saya, begini. Jadi konteksnya betul apa yang tadi disampaikan Pak Riswan, bukan sebagai Anggota Fraksi tetapi Komisi II. Bagaimanapun tentu banyak persoalan-persoalan yang disampaikan, kemana harus disampaikannya, sebagai wakil rakyat tentu punya kewajiban.

Jadi, mereka itu adalah juga konstituen kami, jadi professional kita menyikapi bahwa ketika ada Bimtek itu kita professional. Tidak mengedepankan partai tetapi sebagai Komisi II yang punya kompetensi dalam menyikapi apa yang harus dan tidak terhadap kepentingan-kepentingan penyelenggara Pemilu.

Barangkali demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Cukup dipikirkan nanti di apa? Bahwa rapat saja di KPU.

Silakan Bawaslu.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

**Ketua,**

Sekaligus ini Ketua.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Apalagi Pak Toha?

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Nanti sosialisasi ketika sudah masuk dalam tahapan apa namanya?

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Kampanye.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Kampanye, iya, mohon penjelasan anu Bawaslu saja untuk boleh apa enggak.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Anggota Bawaslu.

**ANGGOTA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA:**

Izin, kalau tidak salah kesepakatan kita itu semua sosialisasi berhenti ketika masuk tahapan kampanye sampai 28 November 2023 Bapak/Ibu. Karena kami takutkan ini akan laporan masyarakat dan lain-lain akan membuat repot nanti teman-teman, khususnya di bawah dan juga Bapak/Ibu juga yang akan dipersoalkan begitu.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Jadi November sudah tidak ada sosialisasi lagi Pak Toha, karena 28-nya sudah kampanye, ya atur saja baik-baik itu.

Silakan.

**ANGGOTA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA:**

Masih panjang Pak, masih dua bulan lagi.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M):**

Oke Bapak/Ibu saya akan jawab.

Tadi hampir sama dengan Mas Hasyim sebenarnya asuransi memang tidak bisa dialokasikan menurut Kementerian Keuangan, suratnya pun berbeda tetapi hampir sama isinya.

Kemudian juga untuk ad hoc juga ada santunan dan sama besarnya. Namun, yang menjadi persoalan memang adalah besaran antara ad hoc Bawaslu dan ad hoc KPU itu berbeda.

Misalnya tadi Mas Hasyim menyebutkan tingkat PPK itu Rp2.500.000,00 kalau Panwascam Rp2.200.000,00, anggota Rp1.900.000,00 mohon maaf Anggota Rp1.900.000,00 jadi berbeda Pak. Walaupun ya menurut kami besar juga perbedaannya tetapi itu angkanya angka emosional, buat kami emosi kadang-kadang itu, tetapi ya sudahlah.

Kemudian pengawas TPS, misalnya di kami Rp1.000.000,00 di KPU Rp1.100.000,00 Mas ya? Kalau tidak salah, KPPS Rp1.100.000,00 beda Rp100.000,00 angkanya emosional juga.

Padahal dulu sebelumnya Bawaslu itu tahun 2019 Rp600.000,00, Rp620.000,00 kalau tidak salah pengawas TPS. Sedangkan KPPS itu sekitar Anggota KPPS itu sekitar Rp560.000,00. Tadi disebutkan sama Mas Hasyim, karena kenapa? Karena bebannya berbeda.

Satu, pengawas TPS mengawasi keseluruhan proses. Nah, itulah yang kemudian tidak dimengerti oleh Kementerian Keuangan pada saat itulah menjelaskan kepada teman-teman Kementerian Keuangan. Tetapi ini bukan hanya ad hoc Pak, sampai Bawaslu RI, sampai KPU RI berbeda diantara kami. Kalau itu berbeda sampai tingkat kabupaten/kota berbeda sampai tingkat kabupaten/kota itu berbeda, kita enggak curhat Pak, tetapi begitulah perbedaannya enggak apa-apa.

Yang penting teman-teman ad hoc sebenarnya kami minta untuk disamakan dengan teman-teman PPK, dengan teman-teman TPS dan juga teman-teman KPPS. Namun, tetap kebijakan Kementerian Keuangan tidak begitu.

*Alhamdulillah* yang santunannya sama Pak, besarnya sama baik KPU maupun pengawas ad hoc. Tadi sudah disebutkan sekitar Rp36.000.000,00 meninggal dunia, cacat permanen Rp30.018.000,00, luka berat Rp16.500.000,00, luka sedang Rp8.250.000,00 dan bantuan biaya pemakaman Rp10.000.000,00

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**



Panwas TPS belum itu Pak.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M.):**

Panwas TPS Rp1.000.000,00, Pak.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Rp1.000.000,00?

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M.):**

Rp1.000.000,00 Pak, beda Rp100.000,00 Pak dengan KPPS, Anggota KPPS.

Kemudian untuk itu, tadi kenapa tidak diajukan permohonan untuk penambahan, sebenarnya kami mengajukan misalnya yang disepakati Rp13.000.000.000.000,00 yang turun Rp7.000.000.000.000,00 itu sebenarnya implisit kami memohon tambahan, apa? Tidak eksplisit Pak Gaus, implisit menentukan tambahan.

Jadi, kalau terlalu eksplisit juga nanti dibilang begitulah. Tetapi dengan implisit misalnya kami kurang sekarang 2023 kurang sekitar Rp6.000.000.000.000,00 itu kami eksplisitkan tetapi tidak kami mohon bisa dibantu untuk mencapai angka segitu, ataupun tidak jauh-jauh dari seperti itu.

Tadi anggaran 2022 kami masukkan juga yang tadi ada perbaikan renovasi kantor dan lain. Kalau Bawaslu kebutuhan kami adalah kebutuhan untuk buat ruang sidang, karena ada judikasi, untungnya tidak ada ajudikasi pada tahun 2022. Sekarang sudah mulai ada kebutuhan itu. Sekarang misalnya hampir 90 sengketa sudah dilaksanakan di setiap kabupaten/kota dan provinsi. Kemudian juga ada judikasi pelanggaran administrasi juga sudah dilakukan.

*Nah*, akibatnya apa? Misalnya ketika anggaran turun Rp7 triliun. Jadi, kalau Bapak/Ibu lihat kita mengalokasikan honorarium Panwascam itu hanya enam bulan, hanya enam bulan. Jadi, sekarang ada Panwascam yang belum terima honor itu sampai dua bulan, sampai bulan ini sampai tiga bulan. Jadi, kadang-kadang mereka melapor secara berjenjang atau juga melalui IG kami masing-masing, pasti IG saya dipenuhi dengan protes Panwascam dan BKD, karena gajinya belum turun dan honorinya belum turun, termasuk operasional Pak, anggaran sewa kantor dan lain-lain.

Ini ada yang kemudian melakukan *switching* tetapi *switching* juga *switching* anggaran tetapi itu mengakibatkan pagu nanti negative, pagu kita ya Pak Sekjen ya nanti negative pagunya, akan bermasalah juga bagi kami, hanya bisa-bisa kita talangi hanya satu bulan pada saat ini.

Jadi, untuk itu kami ada anggaran tambahan sudah ABT sudah turun, itu akan, itu hampir Rp2,8 triliun itu akan, Rp2 triliunnya akan diserahkan kepada, Rp1,5 triliunnya akan langsung pada ad hoc sampai dengan akhir tahun kedepan.

Apa yang, akibatnya bagaimana kalau anggaran itu kurang? Pertama bimtek-bimtek pengawasan itu akan berkurang, misalnya bimtek yang harusnya tujuh hari menjadi hanya tiga hari. Kemudian juga itu akan menurunkan kemampuan teman-teman untuk membaca peta lapangan dan juga peta kerawanan yang ada.

Nanti misalnya kalau teman-teman akan melakukan pengawasan di lapangan tentu juga itukan perlu bensin Pak, karena sekeliling dan lain-lain itu yang kemudian akan jadi persoalan bagi kami untuk membiayai pengawas-pengawas lapangan karena PKD kami harapkan tidak hanya di kantor tetapi PKD itu keliling di lapangan bersama Panwascam, untuk apa?

Tadi pertanyaan tentang politik uang, bagaimana mengindikasikan politik uang dan lain-lain dan juga bagaimana penindakannya, apakah tangkap tangan, itu agak sulit juga tangkap tangan Pak, *alhamdulillah* kadang-kadang laporan, laporan sesama peserta Pemilu itu juga kadang-kadang menguntungkan kami Pak.

Jadi, untuk kami tindaklanjuti dengan laporan tersebut, sehingga kemudian apa yang kemudian kami lakukan biasanya ada patroli pengawasan yang dimulai pada saat kampanye nanti.

Kami harapkan misalnya ketika ada rapat umum modusnya Pak, ini saya cerita modus jadinya. Modusnya itu, maka di daerah sekitaran rapat umum itu akan kebagian politik uang, sekitarnya, bukan ditempatnya. Kalau ditempatnya biasanya akomodasi dan juga transport yang dibagikan. Tetapi transport dan lain-lain itu dibagikan. Sedangkan itu yang kita jaga untuk tidak dibagikan, untuk dicegah untuk tidak diberikan. Jadi, kami juga tidak langsung pengen tangkap tangan Pak, dicegah dulu kita putar itu buat nakut-nakutin Pak, supaya apa? Supaya tidak terjadi proses-proses transaksi praktek uang di lapangan.

Jadi, itu yang kemudian terjadi pada jika anggaran ini tidak direalisasikan secara baik, tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan di, pada saat pembahasan di Badan Anggaran, dan kemudian.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

**Ketua,**

Ketua menyela sebentar, tambah rumit lagi ini ketika satu desa itu ada 37 (tiga puluh tujuh) TPS. Di tempat saya itu ada, namanya Cemani itu 37 TPS dengan 1 PKD, 1 PKD yang gajinya Rp1.000.000,00 harus memutar 37 TPS.

*Nah*, ini harus ada perhatian Mas Bagja, perhatian itu apa? Enggak tahu apa honorinya apa tambah, bisa enggak itu secara peraturan atau undang-undang ditambah PKD-nya.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Cukup ya, sudah ketangkap itu. Sebenarnya Bawaslu mau, cuma Menteri Keuangannya enggak mau. Bawaslunya mau sebenarnya, semuanya mau ini menyikapi.

**F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):**

Kementerian Keuangannya suruh *nyaleg*, Pak.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Jadi, Menteri Keuangannya enggak mau. Nanti kita bicarain lagi lah, kalau Pak Toha punya jalur *lobby* lah Menteri Keuangan itu.

Lanjut.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M.):**

Iya. PKD Rp1.100.000,00 Pak, Rp1.000.000,00 itu pengawas TPS. Rp1.100.000,00 biasanya ada operasionalnya ketika melakukan pengawasan. Namun karena sekarang terbatas ya mau tidak mau agak, kita agak membatasi diri Pak, karena anggaran biaya tambahan ini baru bisa turun dalam beberapa hari kedepan, baru bisa turun sampai, karena ada rekening dana Pemilu khusus untuk itu, karena rekeningnya dibedakan pada Pemilu 2019 ini, eh 2024 ini, tidak seperti 2019 yang lalu.

Jadi RDP itu harus jelas penyebaran turunan distribusi keuangan itu untuk Panwas ad hoc itu melalui rekening dana Pemilu, tidak bisa melalui rekening dana lain. Jadi, untuk ad hoc saja itu lebih dari 60%, Pak untuk itu dari anggaran kita.

Asuransi sudah, hasil konsinyering *insyaallah* akan kami sampaikan secara tertulis nanti.

Kemudian 63% tadi kami jaga Pak, kalau kami serahkan, kami habiskan ini nanti jika ABT tidak turun maka akan jadi permasalahan bagi kami, itu juga mungkin di teman-teman KPU demikian.

Pilpres putaran kedua juga demikian Pak. Honor tidak dikurangi, honor bertambah tetapi masih dalam angka agak berbeda dengan teman KPU untuk pengawas ad hoc.

Demikian Pak kami jawab.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Cukup ya?

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Pak Ketua, sedikit. Pak Ketua, sedikit.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

*Oh, silakan Pak Cornelis.*

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Satu bulan, dua bulan, Pak yang belum dibayar.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Dua bulan, yang belum dibayar.

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Dua bulan yang belum dibayar Pak.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M):**

Bukan tidak dibayar, tidak ada anggarannya Pak.

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Jadi, itu tidak boleh Pak, harus Bapak, Sekretarisnya mana? Sekretaris mana?

*You lobby menteri dong, jangan diam-diam, itu hak azasi manusia. Kalau memang tidak mampu kita tidak usah Pemilu. Kalau perlu tekan dikit menterinya. Saya kemarin sudah tekan itu Dirjennya, ini menyangkut hidup orang.*

Anda-anda itu sebagai pemimpin harus sanggup dan meyakinkan Menteri Keuangan. Saya sudah berjuang di Banggar, kok sampai dua bulan enggak dibayar orang mau makan apa. Coba kita enggak dibayar, ini saya ingatkan ya, sama-sama melobby kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Nanti Pak Cornelis, inikan Banggar, Anggota Badan Anggaran yang ada di Komisi II. Nanti bisa sampaikan ke Ketua Banggar yang sama-sama jugakan, sama-sama partainya kan begitukan.

**F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

**Ketua,**

**Interupsi Ketua,**

Muraz, Pak.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Silakan Pak Muraz.

**F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Tadi Pak Ketua KPU menjelaskan, kan untuk Pilpres putaran kedua tidak dianggarkan.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Sudah *include* tadi, sudah samakan. Jadi 76 triliun lebih itu.

**F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Kan enggak dianggarkan.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Enggak, itu sudah *include* putaran kedua Pilpres.

**F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Tidak direalisasikan?

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Belum direalisasikan karena memang direalisasikannya bertahap.

**F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Bukan Pak Ketua kan usulan 76, realisasi 51, dia dialokasikan sampai 51, jadi kurangnya Rp25.000.000.000.000,00 kan itu kurangnya.

Tadi dijawab oleh Pak Ketua untuk Pilpres putaran kedua akan dianggarkan lagi oleh Menteri Keuangan, begitu Pak Ketua.

Pertanyaan saya kapan dianggarkannya? Itu, apakah bisa 2024 sebelum perubahan lalu menganggarkan lagi, pakai uang apa itu?

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Ini-inikan sudah dianggarkan kan total, kenapa belum dicairkan? Karenakan putaran kedua ini belum ada. Begitu 14 Februari ternyata ada putaran kedua, maka itukan otomatis mustinya kan, otomatis dana untuk putaran kedua, otomatis masuk kerekening KPU. Jadi otomatis Pak ini, kalau saya dengar tadi itu, tetapi kalau supaya Pak Muraznya lebih puas.

Silakan Pak Hasyim.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi di dalam anggaran yang bukan diusulkan ya tetapi sudah disetujui oleh Komisi II dan oleh Banggar sebesar Rp76,6 triliun itu sudah *include* atau termasuk pembiayaan bilamana nanti betul-betul terjadi Pilpres putaran kedua.

Hanya saja di dalam alokasi dipa-nya belum dimunculkan menunggu situasi kalau memang sudah *factual* apa, katakanlah syarat untuk putaran kedua tersedia baru dicairkan atau dialokasikan di KPU. Itu komitmen dari Pemerintah demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Cukup ya?

Silakan, tercatat itu.

**F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Kalau sudah masuk di dalam anggaran pemerintah, itu biasanya kalau belum terjadi dia tidak bayar. Tetapi kalau sudah terjadi atau akan terjadi dia harus siapkan uang itu.

*Nah*, oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada Bapak-bapak yang terhormat ini, anggaran itu masukkan saja, masukkan saja di Banggar di Kementerian, sehingga tidak terjadi seperti ini tadi, enggak dibayar.

Jadi, kalau dia sudah masuk di situ tidak ada masalah. Kalau misalnya terjadi pemilihan keduakan, tetap pemerintah carikan uangnya. Tetapi kalau belum masuk, itu yang jadi persoalan. Jangan lupa itu, jangan lenggah. Paham, ini kita diajar pula.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-NASDEM):**

Jadi begini, saya ingin sampaikan dulu ini. Anggaran itu sudah ada dan sudah disetujui oleh Pemerintah dan DPR, oleh Badan Anggaran besar juga sudah. Jadi enggak ada uang ini, cuman kapan, kan tadi faktualnya belum ada. Maka uang itu belum dialokasikan oleh Pemerintah tetapi 76 itu sudah menjadi anggaran resmi Pemilu, begitu ya.

Mudah-mudahan itu nanti Pak Cornelis untuk diingatin terus itu nanti di Badan Anggaran agar enggak lupa nanti, begitu ada putaran kedua enggak lupa itu mencairkan itu.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Sebelum kita mengakhiri rapat kita pada hari ini, kita akan sama-sama setuju kesimpulan rapat kita pada hari ini.

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Selasa, 12 September 2023.

Pertama, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI tahun 2024 sebesar Rp28.365.496.586.000,00 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp33.396.873.000,00. Dengan demikian alokasi anggaran KPU RI tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459.000,00 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. Program dukungan manajemen Rp2.111.863.231.000,00. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp26.287.030.228.000,00.

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu RI tahun 2024. Yang pertama setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Komisi II DPRI RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu RI tahun 2024 sebesar Rp11.605.527.974.000,00 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp6.092.142.000,00. Dengan demikian pagu anggaran, pagu alokasi anggaran Bawaslu RI tahun 2024 menjadi

sebesar Rp11.611.620.116.000,00 dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.368.710.388.000,00. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp10.242.909.728.000,00. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Ketiga, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar Rp1.418.643.553.000,00 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran, pagu devinitif Bawaslu RI tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Ini kesimpulan rapat kita. Dengan demikian sebelum rapat diakhiri. Ini tadi Ketua Komisi berbisik, agar seluruh penyelenggara Pemilu itu bisa bersinergi, berkolaborasi, terkonsolidasi dengan baik dan tidak saling destruktif karena kita akan menghadapi Pemilu yang luar biasa, itu membutuhkan kolaborasi dan sinergi diantara kita semua agar Pemilu kita berjalan dengan berkualitas.

**Pak Ketua,**

Jangan saling memecat sesama penyelenggara Pemilu, katanya begitu. Maka dengan demikian rapat saya akhiri.

*Wabillahitaufik wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.38 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.**  
**197504202002122002**